

BAB III

PERS SURABAYA DALAM KONFLIK POLITIK

1960-1965

A. Sikap Pemerintah Terhadap Pers

Sikap Pemerintah terhadap pers di Surabaya adalah sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya mengenai peraturan-peraturan dari Pemerintah. Upaya Presiden untuk merumuskan program pembangunan dilakukan melalui pembentukan Dewan Perancang Nasional yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Hasilnya adalah pola Pembangunan Semesta Berencana 8 tahun. Lampiran A ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang penerangan Massa menjadi landasan bagi pelaksanaan Manipulasi Pers Nasional dalam sistem Demokrasi Terpimpin¹.

Ketetapan tersebut menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsungan revolusi dan peranannya dalam pembangunan

¹ Baharudin, *Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1997) hlm. 80.

nasional dapat terwujud. Menurut ketetapan tersebut, semua media komunikasi massa, seperti radio, pers, dan film harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin, berencana dan terus-menerus kearah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Pancasila². Sarana komunikasi massa tersebut harus dapat pula menjangkau daerah-daerah terpencil.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menciptakan pers manipol menuju tercapainya pers sosialis adalah:

- Mendirikan kantor berita nasional yang kuat dan lengkap.
- Membantu organisasi penerbitan pers menyelenggarakan seminar-seminar pers.
- Mengadakan pendidikan dan latihan bagi para insan pers.
- Mengadakan pendidikan wartawan.
- Membantu penyediaan kertas koran.
- Menyelenggarakan kunjungan kerja oleh wartawan ke proyek-proyek pembangunan.
- Menyiapkan Undang-Undang pers yang mencakup antara lain: penjabaran fungsi-fungsi pers dalam rangka melaksanakan Manipol demi kelangsungan revolusi dan pembangunan semesta berencana,

² Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: Gunung Agung, 1988) hlm. 122.

penjabaran hak-hak dan kewajiban pers serta penjabaran kebebasan pers sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.

- Mendorong penerbitan pers terutama peredarannya dikalangan rakyat pekerja.
- Membangun pabrik-pabrik kertas agar impor kertas koran tidak diperlukan lagi.
- Meningkatkan kesejahteraan pekerja-pekerja pers³.

Pada waktu itu Pemerintah telah mengeluarkan juga peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) no. 3/1960 mengenai larangan menerbitkan surat kabar yang menggunakan aksara Cina. Dalam rangka menyediakan bacaan bagi golongan masyarakat Cina yang masih buta bahasa Indonesia dan untuk kepentingan penerangan revolusi pemerintah mengizinkan beberapa pers Cina yang disesuaikan, seperti Che Chi Pao (Obor Revolusi)⁴.

Selanjutnya pada 12 Oktober 1960, keluar lagi peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 10/1960 mengenai keharusan bagi penerbit untuk memperoleh izin terbit⁵. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 2/1961 mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan-percetakan swasta.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

⁵ Abdurachman Surjomiharjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan RI, 1980) hlm. 307.

Keputusan Presiden RI No. 307/1962 mengenai pembentukan Lembaga Kantor Berita Antara (24 September 1962). Penetapan Presiden RI No. 6/1963 mengenai ketentuan-ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini:

1. Peraturan Peperti No. 10/1960:

Peraturan Peperti No. 10/1960⁶ dilengkapi dengan surat Presiden No. 3569/HK/1960 yang juga bertanggal 12 Oktober 1960. Menurut Presiden: pers harus dibersihkan dari musuh-musuh Revolusi dan sistem perizinan surat kabar dan majalah dirombak⁷.

Berdasarkan Peraturan Peperti No. 10/1960, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum izin terbit dikeluarkan, diantaranya:

1. Mendukung dan membela Manipol dan program pemerintah.
2. Menjadi alat penyebarluasan Manipol dengan tujuan menghapus imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme dan separatisme.
3. Membela politik luar negeri bebas dan aktif serta mendukung pelaksanaannya, tidak mendukung perang dingin antara dan blok asing serta tidak menjadi alat perang tersebut.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 311.

Musuh-musuh Revolusi yang dimaksud disini adalah golongan yang tidak setuju akan adanya perubahan yang dijalankan oleh pemerintah, golongan tersebut merupakan golongan yang mendukung imperialisme, kolonialisme khususnya dari dunia Barat.

4. Memperkuat keyakinan rakyat Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar, orientasi, program dan kepemimpinan revolusi.
5. Menyokong setiap langkah untuk menciptakan ketertiban umum, keamanan maupun ketenangan situasi politik.
6. Meningkatkan kesadaran terhadap kepribadian Indonesia, umpamanya mencegah tulisan-tulisan, gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang bersifat sensasi dan bertentangan dengan susila.
7. Memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap keadaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan selalu berpedoman pada Manipol⁸.

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut, para penerbit dan pemimpin redaksi surat kabar dan majalah juga diwajibkan untuk menandatangani pernyataan berisi 19 pasal dari formulir permohonan izin penerbitan surat kabar dan majalah. Ke-19 pasal tersebut adalah:

1. Kami sanggup mematuhi pedoman-pedoman yang telah/dan/atau akan dikeluarkan/diberikan oleh Penguasa Perang Tertinggi dan lain-lain instansi pemerintah yang berwenang mengenai penerbitan.
2. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela manifesto politik RI secara keseluruhan.

⁸ Tribuana Said, *op.cit.*, hlm. 123.

3. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela program pemerintah.
4. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela UUD 1945.
6. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Pancasila.
7. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Sosialisme Indonesia.
8. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Demokrasi Terpimpin.
9. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela Ekonomi Terpimpin.
10. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela kepribadian nasional Indonesia.
11. Penerbitan kami wajib menjadi pendukung dan pembela martabat negara Republik Indonesia.
12. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memberantas imperialisme dan kolonialisme, liberalisme, federalisme/separatisme.
13. Penerbitan kami wajib menjadi pembela/pendukung dan alat pelaksana dari politik bebas dan aktif negara RI serta tidak menjadi

pembela/pendukung dan alat dari perang dingin antara blok negara asing.

14. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila.
15. Penerbitan kami wajib menjadi alat untuk memupuk kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Manifesto Politik RI.
16. Penerbitan kami wajib membantu usaha menyelenggarakan ketertiban dan keamanan umum serta ketenangan politik.
17. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang bersifat sensasional dan merugikan akhlak.
18. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung penghinaan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara asing yang bersahabat dengan RI.
19. Penerbitan kami tidak akan memuat tulisan-tulisan, lukisan-lukisan atau gambar-gambar yang mengandung pembelaan terhadap organisasi yang dibubarkan atau dilarang berdasarkan penetapan Presiden No. 13 tahun 1960⁹.

⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerbitan pers yang tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izin terbitnya, ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, dan surat kabar dan majalah yang diterbitkan tanpa izin akan disita serta dimusnahkan. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sejak 1 November 1960 dan ditandatangani oleh menteri Pertama Djuanda dalam kedudukan sebagai pejabat Presiden dan Penguasa Perang Tertinggi selagi Presiden Sukarno berada diluar negeri¹⁰.

2. Peraturan Peperti No. 2/1961:

Peraturan Peperti No. 2/1961¹¹ khusus mengenai pengawasan dan pembinaan atas perusahaan-perusahaan percetakan swasta. Prinsip dasar yang melandasi peraturan tersebut adalah bahwa percetakan harus menjadi alat untuk menyebarkan Manipol dan untuk memberantas imperialisme, kolonialisme, liberalisme serta federalisme dan separatisme. Seperti halnya terhadap penerbitan, percetakan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan dicabut izinnya atau ditutup.

3. Keputusan Presiden No. 307/1962:

Keputusan Presiden No. 307/1962¹² didahului oleh pertentangan di dalam Antara sendiri antara kelompok anti PKI yang diketuai Zein Effendi

¹⁰ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *Pers jatim Dari Masa ke masa* (Surabaya: SPS Jatim, 1994) hlm. 94.

¹¹ Tribuana Said, *op.cit.*, hlm. 126.

¹² *Ibid.*

melawan kelompok Djawoto, mengenai kebijakan pemberitaan. Sebenarnya arahan untuk menguasai kantor berita Antara dalam kerangka manipulasi pers telah diletakkan oleh MPRS melalui ketetapan MPRS No. II/1960 yang menggariskan perlunya mendirikan satu kantor berita nasional yang kuat.

Pertentangan di kantor berita tersebut memuncak pada 25 Mei 1962 dengan pencopotan Djawoto oleh Dewan Direksi. Menyusul gelombang reaksi dari grup pers PKI, tiga hari kemudian presiden memutuskan penguasaan Antara oleh Peperti (Keppres No. 307) menjelang penyatuannya dengan yayasan Persbiro Indonesia (PIA). Pada tanggal 12 Desember PIA dikuasai oleh Peperti hingga waktu penentuan penyatuannya pada Lembaga Kantor Berita Nasional yang kuat dan lengkap berasaskan Sosialisme Indonesia, yaitu sosialisme berdasarkan Pancasila.

4. Penetapan Presiden No. 6/1963:

Pembentukan kantor berita tunggal di Indonesia dalam bentuk LKBN (Lembaga Kantor Berita Nasional) Antara merupakan hasil yang dicapai menyusul Ketetapan MPRS No. II/1960, hasil lainnya adalah berdirinya Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta, seminar-seminar pers, pendidikan dan latihan wartawan yang diselenggarakan oleh PWI.

Penetapan Presiden No. 6/1963¹³ meletakkan prinsip-prinsip yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk, tujuan dan pelaksanaan pembinaan pers guna melaksanakan Pancasila dan Manipol dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Pelaksana dan pengawas pembinaan pers adalah menteri penerangan dibantu Kepala Staf ketiga Angkatan, Kepala kepolisian Negara dan Jaksa Agung dan ditambah beberapa petunjuk teknis seperti prosedur permohonan izin terbit. Penetapan Presiden No. 6/1963 dalam semangat dan isinya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1960. Tetapi setelah pencabutan SOB dan berlakunya kembali Hukum Sipil pada permulaan Mei 1963, dan sebelum adanya Undang-Undang pers pihak pemerintah beranggapan bahwa penetapan Presiden tersebut berikut petunjuk pelaksanaannya sudah merupakan pedoman pokok pembinaan pers terlengkap yang mampu berfungsi sebagai pengganti undang-undang pers¹⁴.

Selain peraturan-peraturan di atas pemerintah juga mengeluarkan kebijaksanaan yang dianggap perlu untuk menciptakan keadaan yang dirasakan aman guna mewujudkan terlaksananya Demokrasi Terpimpin yang diciptakan Presiden Soekarno.

¹³ *Ibid.*, hlm. 128.

¹⁴ *Trompet Masyarakat*, Sabtu 18 Mei 1963.

B. Keterlibatan Pers dalam Konflik Politik Antara Komunis dan Anti Komunis

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 atau Dekrit kembali ke UUD 1945. Pers dan alat-alat penyiaran lain, seperti radio dilarang menyiarkan kegiatan-kegiatan politik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, yang menyudutkan Nasakom. Penguasa mulai mengetatkan pengawasan terhadap pers serta mempererat pengendaliannya. Jika pada awal perjuangan kemerdekaan dan masa-masa setelah Proklamasi Kemerdekaan orang dapat menerbitkan surat kabar atau majalah dengan mudah, pada masa tahun 1960-1965 persyaratan untuk mendapatkan SIT (Surat Izin Terbit) dan surat izin cetak semakin diperketat. Tahun 1960 semua penerbitan surat kabar atau majalah diwajibkan mengajukan permohonan SIT.

Berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan pers yang tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut izin terbitnya, ditindak berdasarkan hukum yang berlaku dan surat kabar atau majalah yang diterbitkan tanpa izin akan disita serta dimusnahkan. Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Nopember 1960 dan ditandatangani oleh Menteri Pertama Djuanda dalam kedudukannya sebagai pejabat Presiden dan Penguasa Perang Tertinggi selagi Presiden berada di luar negeri.

Pertentangan dalam jajaran Pers Surabaya khususnya dalam tulisan-tulisan yang dibuat baik oleh pers yang pro PKI maupun yang kontra PKI meluaskan sorotan dan kesadaran masyarakat, terutama insan-insan pers terhadap ofensif PKI di bidang

pers. Penyusupan PKI dan pendukungnya di organisasi PWI, SPS, Kantor Berita Antara dan lain-lain menimbulkan kecemasan di sebagian kalangan pers. PKI semakin memperluas jaringan agitasi dan propagandanya dengan menerbitkan koran-koran baru, baik di Surabaya maupun kota-kota lain di seluruh Indonesia¹⁵.

Pada tahun 1963, PWI cabang Surabaya melakukan pemilihan pengurus yang baru, yang kemudian diketuai oleh A. Azis. Tahun itu PKI mengadakan manuver untuk bisa menguasai PWI pusat Jakarta. Oleh karena itu atas perintah Presiden Soekarno diselenggarakan kongres PWI di Jakarta. Perwakilan PWI Surabaya yang berangkat ke kongres tersebut adalah A. Azis, A. Manan dan M. Binsyech. Dalam kongres tersebut terjadi pertentangan yang cukup keras, terutama saat menentukan calon ketua umum PWI pusat yang baru. Sejumlah wartawan dari Koran-koran PNI pecah menjadi dua kelompok. Beberapa diantaranya mendukung pencalonan *Karim Daeng Pratomo* (tokoh PKI). Sementara yang lainnya mendukung *Soepeni*, dan akhirnya Karim DP berhasil memenangkan pemilihan ketua DPP PWI.

Sejumlah wartawan yang dipelopori oleh Adam Malik, B.M. Diah dan Soemantoro mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) di lingkungan Pers di Jakarta sebagai wadah perlawanan terhadap ofensif PKI di bidang media massa, didukung oleh wartawan-wartawan muda, antara lain

¹⁵ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *op.cit.*, hlm. 99.

Harmoko, Zulharmans dan lain-lainnya. Simpatisan BPS di Surabaya adalah majalah *Sketsmasa* dan harian *Suara Rakyat*. Simpatisan BPS tersebut hampir setiap penerbitannya memuat tulisan yang berjudul “Belajar Memahami Soekarnoisme” karya Sayuti Melik¹⁶.

Gerakan BPS di lingkungan pers tersebut ternyata mendapat dukungan (pengakuan setuju akan adanya tulisan yang mendukung ajaran Bung Karno agar dapat dimengerti oleh kalangan masyarakat luas) dari berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan di Surabaya seperti SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Seluruh Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), MKGR (Musyawarah Keluarga Gotong Royong), GPS (Gerakan Pemuda Sukarno) dan lain-lainnya¹⁷.

Untuk mendukung BPS maka pada tanggal 12 September 1964 di Surabaya dibentuk Gerakan Pemuda Sukarno (GPS) yang bernaung di dalam Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR). Pemrakarsa GPS adalah Achjat dan Moh. Binsjeh. Tiga hari kemudian papan nama GPS di depan kantor sekretariatnya di jalan Raya Darmo dihancurkan oleh pemuda-pemuda PKI. Setelah itu berdiri pula Gerakan Mahasiswa Sukarnoisme (GMS)

¹⁶ Edward Cecil, Penerjemah: Atmakusumah dkk, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1983) hlm. 233.

¹⁷ SPS Cabang Jatim, *Sejarah Pers di Jatim* (Surabaya: SPS Cabang Jatim, tth) hlm. 293.

Bahan tersebut merupakan kumpulan dari klipang yang dikumpulkan oleh Oie Hiem Hwie semasa ia masih aktif dalam jurnalistik.

dibawah naungan MKGR. Pimpinannya terdiri O. Sukahardojo, Wardojo, Suwanto K, Is Soedarsa, H. Soebandara, Suryati dan Ryanto.

Perkembangan yang pesat di tubuh BPS dipandang oleh PKI dapat membahayakan keberadaannya, oleh karena itu PKI melalui media yang mereka miliki seperti *Trompet masyarakat*, *Djawa Timoer* melancarkan manuver-manuver politik terhadap BPS dengan menyebarkan tuduhan bahwa BPS diorganisasikan dan dibiayai oleh CIA (*Central Intelligence Agency*), Dinas Intelijen Amerika Serikat, dan menerima dana dari mereka sebanyak AS \$ 500 juta. Tuduhan tersebut ternyata ditanggapi oleh Presiden Soekarno dan selanjutnya Presiden Soekarno membubarkan BPS¹⁸.

Pada tanggal 23 Februari dan 23 Maret 1964, Presiden melalui keputusan No. 72/KOTI/1964 memerintahkan pembredelan 28 surat kabar anggota BPS baik harian, mingguan, majalah di seluruh Indonesia, masing-masing 12 di Jakarta, 14 di Medan dan di Padang serta di Semarang¹⁹.

Reaksi dari dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 72/KOTI/1964 tentang pembredelan terhadap surat kabar yang terlibat BPS, maka PWI Surabaya mengadakan pemecatan sejumlah wartawan anggota PWI yang terlibat BPS. Antara lain Wiwiek Hidayat (Kantor Berita Antara),

¹⁸ SPS Pusat, *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia* (Jakarta: SPS Pusat, 1971) hlm. 129.

¹⁹ Tribuana Said, *Perlawanan Pers Indonesia BPS terhadap Gerakan PKI* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983) hlm. 73.

Basuki Rahmat (Jayabaya), Hari SA (Terang Bulan), dan Faried Dimiyati (Harian Umum)²⁰. Surat pemecatan itu dikirim oleh PWI pusat yang diketuai Karim DP (Ketua PWI Pusat dari PKI), bertanggal 24 Desember 1964²¹. Pembredelan surat kabar tidak sampai terjadi di Surabaya, karena di Surabaya surat kabar yang resmi ikut dalam keanggotaan BPS tidak ada, melainkan hanya wartawan secara perorangan yang menjadi anggota BPS, tidak mengikutsertakan perusahaan dimana ia bekerja²². Dengan pembredelan wartawan dan surat kabar anggota BPS, merupakan suatu kemenangan bagi PKI dan pendukung-pendukungnya.

Penutupan Koran-koran BPS itu, sepenuhnya memperoleh dukungan dari Presiden Soekarno. Dalam rapat akbar "Maju Tak Gentar" untuk memperingati HUT PWI tanggal 23 Februari 1965 di Senayan, Presiden Soekarno dengan nada emosional memerintahkan agar koran-koran BPS dihapuskan.

"Saya dulu juga pernah membubarkan BPS...perintah saya untuk membubarkan BPS tentu saja beralasan. Saya mendapat info, keterangan rahasia. Bahwa CIA menunggangi BPS...Nah, sesudah saya mendapat info itu dan sesudah melihat di dalam prakteknya. BPS ini anti Nasakom maka saya bubarkan BPS ini. Saya berkata dengan tegas, surat kabar apapun, organisasi apapun, alat apapun yang menjadi

²⁰ PWI Cabang Jatim, *37 Tahun PWI cabang Jatim 9 Februari 1946-1983* (Surabaya: Panitia HUT ke-37 cabang Jatim, 1983) hlm. 5.

²¹ Serikat Penerbit Surat kabar Jatim, *op.cit.*, hlm.100.

²² *Ibid.*, hlm. 294.

anteknya BPS, bubarkan saja! Saya ulangi, saya tidak plintat-plintut. Yang harus dibubarkan ialah apapun yang menjadi anteknya BPS”²³.

Peringatan HUT PWI seperti yang dilaksanakan di Jakarta, mendorong sejumlah anggota dan pengurus PWI cabang Surabaya menghendaki adanya rapat akbar serupa di Surabaya. Melihat permintaan anggota dan pengurus, ketua PWI cabang Surabaya A. Azis tidak bisa menolak untuk mengadakan rapat umum, hanya Binsyekh yang menolak karena rapat umum seperti itu tidak bisa memecahkan masalah pembredelan surat kabar anggota BPS. Awalnya rapat umum akan dilaksanakan di gedung utama THR (Taman hiburan Remaja). Ketua PWI, Karim DP ikut hadir. Tetapi sebelum rapat berlangsung dilarang oleh kepolisian dengan alasan tidak ada izin.

Gagal melaksanakan rapat umum di Surabaya, pengurus PWI cabang Surabaya menghubungi Bupati Malang untuk melaksanakan rapat umum HUT PWI di Pendopo Kabupaten Malang. Tetapi ternyata rapat umum tersebut tidak berlangsung dengan baik karena ada beberapa pihak pers dari golongan NU dan Masyumi yang tidak senang diadakannya rapat tersebut terutama karena ketua PWI Pusat, Karim D.P. adalah anggota PKI²⁴.

Pada tanggal 26 Maret 1965, Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan baru, yaitu keputusan Menteri Penerangan No.29/SK/M/65

²³ Tribuana Said, *Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI*, *op.cit.*, hlm. 83.

²⁴ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *op.cit.*, hlm. 101.

mengenai Norma-Norma Pokok Pengusaha Pers dalam rangka Pembinaan Pers Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut nama surat kabar diwajibkan berafiliasi kepada partai politik atau organisasi masyarakat (ormas) yang diakui pemerintah. Jadi sifatnya menutup peluang bagi anggota masyarakat non-partai untuk menerbitkan surat kabar atau majalah yang bersifat umum. Tiap penerbitan pers harus mendapatkan pernyataan dukungan resmi dari partai politik, organisasi massa atau pemerintah.

Di samping itu susunan dewan redaksi penerbitan harus mendapatkan pernyataan dukungan resmi dari afiliasi tersebut. Untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru tersebut. Pihak penerbitan diberi waktu 6 bulan sejak tanggal berlakunya penetapan untuk mencari afiliasi atau dukungan, misalnya: *Sketsmasa* berafiliasi dengan Pemerintah, *Trompet Masyarakat* berafiliasi dengan PKI²⁵.

Sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, di daerah-daerah muncul koran yang sama namanya dengan koran Jakarta, ditambah dibelakangnya "Edisi" dimana ia terbit. Di Jawa Timur harian *Suluh Berita* menjadi *Suluh Indonesia edisi Jatim*. *Obor Revolusi* menjadi *Duta Masyarakat edisi Jawa Timur*, *Manifesto* menjadi *Berita Yudha edisi Jawa Timur*.

²⁵ Tribuana Said, *Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap Gerakan PKI, op.cit.*, hlm. 31.

Gaya penulisan surat kabar pro-komunis cenderung menyudutkan pihak yang berlawanan dengannya, misalnya terlihat laporan besar-besaran harian *Djawa Timoer (pro PKI)* yang membongkar apa yang mereka sebut Gerakan Anti Soekarno (GAS). Pada edisi 12 November 1962 surat kabar ini menurunkan berita fiktif berjudul "*Orang-orang Mbambung dihasut*", kemudian disusul edisi 15 November 1962 berjudul "*Komplotan GAS terbongkar*". Akibat tulisan itu Djoeki A. Azis ditahan oleh pihak berwajib, disusul pembredelan sementara terhadap harian *Djawa Timur* pada tanggal 27 November 1962, dengan pencabutan SIPK. Kemudianizinkan terbit kembali sampai larangan terbit tetap setelah meletusnya G.30.S/PKI. Untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tentang GAS tahun 1963, Djoeki A. Azis diperiksa di Pengadilan Negeri²⁶.

Pembelaan Djoeki A. Azis setebal 36 halaman kemudian diterbitkan oleh penerbit *Djawa Timur Press* dengan judul "Para wartawan Indonesia bersatulah! Kami menuntut! Namun akhirnya hakim menyatakan Djoeki A. Azis bersalah pada sidang tanggal 3 Juli 1963 dengan vonis hukuman penjara 1 bulan dalam masa percobaan 6 bulan.

Harian *Trompet Masyarakat* sampai meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI masih mencoba begitu vokal menyuarakan suara-suara partai

²⁶ *Djawa Timoer*, 12 November 1962.

PKI, misalnya pada edisi Rabu, 6 Oktober 1965²⁷, masih menurunkan berita berjudul “BPS di Kantor Pos diganyang”. Isinya SB Postel SOBSI dan KB Postel Marhaenis mengganyang SSPT (Serikat Sekerja Post dan Telekomunikasi) antek BPS. Beberapa hari kemudian surat kabar ini terkena larangan terbit oleh Pepelrada Jawa Timur.

Surat kabar komunis pertama yang terkena SK larangan terbit dari Pepelrada Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1965 adalah *Harian Djalan Rakyat*²⁸. Surat kabar ini diasuh oleh Is Soekandar (pemimpin umum) dibantu oleh dewan redaksi terdiri dari Hidajat Djati, Soerjonno Hadi dan Moeljono BA. Surat kabar ini diterbitkan oleh Yayasan Penerbit Gotong Rojong Jl. Gentengkali 8 Surabaya dan gencar menyerang kelompok-kelompok ormas anti komunis, seperti pernyataan organisasi-organisasi kemahasiswaan prokomunis yang mendukung pembubaran HMI.

Media komunis lain adalah *Mingguan Indonesia* milik Partindo. Surat kabar minggu ini mulai terbit tahun 1963. Media komunis yang lain adalah *Mingguan Pemuda* yang dipimpin Agung WP dan Samdono W yang terbit tahun 1964, dicetak di percetakan Harapan Djaja Surabaya.

Untuk menandingi koran-koran PKI, sekaligus menampung wartawan-wartawan anggota BPS yang kehilangan pekerjaan akibat dikeluarkan dari

²⁷ *Trompet Masyarakat*, 6 Oktober 1965, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*, 9 Oktober 1965, hlm. 1.

perusahaan, ABRI menerbitkan *DinamikalHarian Angkatan Bersenjata edisi Jatim*, pihak Angkatan Darat menerbitkan harian *Berita Yudhal Manifesto*.

Surat Kabar *Manifesto* sudah lama tidak disukai media-media komunis karena beritanya sering menyudutkan pihak PKI. Perwira intelijen di Kodam VIII/Brawijaya, Mayor Moch Said berinisiatif mendirikan surat kabar *Manifesto*, sasarannya adalah untuk membendung aksi-aksi PKI lewat Media Masa. Surat kabar ini selalu menurunkan berita mengenai aksi-aksi sepihak PKI seperti penggerebekan atas latihan kader Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro, Kediri, yang terkenal dengan sebutan *Kanigoro Affair*.

Adakalanya surat kabar anti komunis itu tidak bisa berbuat apa-apa jika himbauan itu datang dari Peperda (Penguasa Perang Daerah), misalnya berita peristiwa aksi sepihak PKI di Bandar Betsy. Waktu itu M. Binsyeksh dan Pech Dijono mencoba menemui Pangdam VIII/Brawijaya, Basuki Rakhmat, ternyata himbauan untuk tidak memuat berita itu berasal dari KSAD A. Yani. Semula Binsyeksh tetap berusaha menurunkan berita itu sebagai headline²⁹. Tetapi akhirnya dicabut karena Pangdam VIII/Brawijaya tetap menegaskan larangan itu. Akhirnya berita itu dicabut dan halamannya dibiarkan kosong. Esok harinya *Manifesto* terbit dengan headline putih³⁰.

²⁹ Headline : berita utama.

³⁰ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, op.cit., hlm. 103.

Kasus itu menimbulkan pertanyaan di kalangan pembaca. Bahkan asisten intel Kodam VIII/Brawijaya menanyakan hal itu lewat telepon. Binsyekh menjawab bahwa karena tidak ada berita yang sesuai, berita yang dicabut akibat larangan pemuatan itu dibiarkan kosong ternyata justru *Manifesto* edisi itu laris dan dicari pembaca. Berita lain yang menggegerkan masyarakat yang diturunkan surat kabar ini adalah sekitar usul penonaktifan Walikota Surabaya yang pro-PKI, Murakhman SH, sekitar awal tahun 1965. Berita itu bermula dari rapat rahasia tokoh-tokoh partai NU, MURBA, dan IPKI. Rapat rahasia itu sepakat untuk mendesak pemerintah pusat untuk menonaktifkan Murakhman SH sebagai walikota Surabaya. Rapat rahasia itu diketahui oleh Binsyekh, lalu menulisnya menjadi berita. Saat itu para redaktur *Manifesto* sedang mengadakan rapat untuk membicarakan tentang headline edisi esok harinya. Ketika Binsyekh menyodorkan berita yang dibuatnya, semua redaktur setuju³¹.

Akibat berita itu, keesokan harinya kantor Harian *Manifesto* didemonstrasi Pemuda Rakyat dari PKI. Mereka menuduh *Manifesto* sebagai koran imperialis. Beberapa minggu kemudian sebuah demonstrasi tandingan dilakukan oleh massa NU dan Pemuda Ansor mendukung berita itu. Iring-iringan aksi pemuda NU itu berjalan dari JL. Panghela (kantor harian

³¹ *Ibid.*

Manifesto) sampai Jl. Jagalan. Akibat berita itu harian *Manifesto* edisi hari itu sangat laris. Meskipun sebelumnya pada pukul 5 pagi pencetakan sudah dihentikan tetapi pukul 8 pagi dicetak ulang.

Surat kabar yang menurunkan tulisan yang dinilai merugikan PKI, dapat dicap sebagai koran kontra revolusi. Ini dialami oleh Peck Dijono, wartawan *Manifesto*. Pada edisi 2 Mei 1965 menurunkan tulisan penyelewengan di PT Semen Gresik yang disusul dengan dipecatnya dua karyawan SOBSI (Serikat organisasi buruh Seluruh Indonesia) (organ PKI)) dengan tuduhan akan meledakkan gudang. Pada HUT PT Semen Gresik ke-8 pada tanggal 7 Agustus 1965 Kol. Hadi Moeljono dari kantor Direktorat Jenderal Perindustrian dan Pertambangan Jawa Timur yang pro PKI menyebut Peck Dijono sebagai wartawan subversif dan kontra revolusi.

Harian *Manifesto* kemudian berubah menjadi *Berita Yudha edisi Jawa Timur*, tetap dipimpin Kol. Moh. Said, dan diserahkan pengawasannya kepada Letkol Soenjoto, kepala Penerangan Kodam VIII/Brawijaya. Bersamaan dengan terbitnya *Manifesto*, sebenarnya Letkol Soenjoto dan Mayor Asnan juga menerbitkan surat kabar sendiri bernama *Dinamika*. Dalam Yayasan Setia Kawan sebagai Badan Penerbit surat kabar ini, ikut duduk pula Singgih, Akhiyat dan Kadarisman. Surat kabar ini beralamat di Jl. Sulawesi 48 Surabaya. Ketika *Manifesto* berubah menjadi *Berita Yudha edisi Jawa Timur*, sedang harian *Dinamika* berubah menjadi *Angkatan Bersenjata edisi Jawa*

Timur. Kemudian Kodam VIII/Brawijaya sendiri tengah memproses SIT harian *Bhirawa*. Dengan terbitnya SIT harian itu *Berita Yudha edisi Jawa Timur* digabungkan dengan *Bhirawa*³².

Kodam VIII/Brawijaya yang pernah menerbitkan surat kabar, khususnya memuat foto-foto kegiatan instansi militer ini, diberi nama *Lensa Karya*³³. Bahkan Kodam VIII/Brawijaya pada masa awal Demokrasi Terpimpin sempat menerbitkan surat kabar berbahasa Tionghoa bernama *Hung Pai Po* yang artinya surat kabar merah putih. Edisi pertamanya terbit 10 Desember 1959, sasarannya orang-orang Tionghoa yang belum lancar membaca bahasa Indonesia maupun huruf latin.

Kodam VIII/Brawijaya memberi kepercayaan kepada Soeripto Putera Djaja untuk memimpin *Hung Pai Po*, dibantu oleh Gan Kang Sing, Tjoa King Lun, Moch Binsyekh dan Peck Dijono, didampingi oleh sejumlah penerjemah bahasa Mandarin menyusupkan berita-berita tentang Taiwan. Akibatnya pimpinan surat kabar ini berkali-kali dipanggil oleh DPKN (Dinas Pengawasan Keselamatan Negara).

Kehidupan penerbitan pers non komunis di zaman 1960-1965 cukup memprihatinkan, disamping kondisi percetakan belum sempurna, seringkali diboikot oleh buruh percetakan yang sebagian besar dikuasai oleh Serikat

³² Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *op. cit.*, hlm. 105.

³³ *Ibid.*

Buruh Pertjetakan Indonesia (SBPI) bagian dari SOBSI. Ini dialami oleh harian *Surabaya Post*. PKI menilai koran ini sebagai surat kabar sosialis-kanaan yang harus dimusuhi. Seringkali mereka menyabot percetakan surat kabar ini, dengan dalih bermacam-macam. Tak jarang banyak kolom kosong terpaksa diisi iklan gratis untuk menghindari ruang putih. Karyawan di bagian koreksi seringkali juga bekerja seenaknya, sehingga banyak kesalahan tak sempat dibetulkan. Surat kabar yang didirikan A. Azis dan istrinya tahun 1953 ini tetap bertahan terbit³⁴.

Surat kabar lain yang juga dimusuhi PKI adalah Harian *Obor Revolusi*. Koran ini berafiliasi terhadap partai NU, memiliki motto “Memenangkan Pantjasila dan Agama” diterbitkan oleh PT Asri Nur. Surat kabar ini dicetak di percetakan Grafika Karya bersama dengan *Surabaya Post*, *Trompet Masyarakat* dan sebagainya. Karena itu kasus boikot oleh SBPI SOBSI secara diam-diam juga dihadapi oleh surat kabar *Obor Revolusi*³⁵.

Pada bulan April 1965 di Surabaya juga terbit surat kabar mingguan baru yang sejalan dengan harian *Obor Revolusi*, yaitu mingguan *Warta*

³⁴ Nurinwa Kis Hendrowinoto, *A. Aziz Wartawan Kita* (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm. 132.

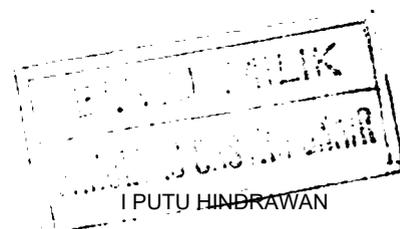
³⁵ Surat kabar baik yang pro PKI maupun yang kontra dapat berada di percetakan yang sama yaitu di percetakan Grafika karya, karena percetakan tersebut merupakan badan yang *independen*, tidak berada di dalam pemilikan satu surat kabar. Sehingga jika terjadi aksi pemboikotan yang dilakukan oleh pekerja yang termasuk dalam SOBSI di percetakan tersebut, itu merupakan diluar tanggung jawab dari surat kabar yang dicetak di percetakan tersebut.

Minggu Djaja dan Fajar Minggu. *Mingguan Warta Minggu Djaja* beralamat Jl. Indrapura 43-I Surabaya sedangkan *Fajar Minggu* tidak jelas alamatnya³⁶. Harian ini menampakkan sekali pembelaannya terhadap ormas-ormas Islam yang diserang oleh PKI lewat medianya, misalnya ketika media-media komunis menyerang HMI sebagai dalang demonstrasi ke percetakan Brantas Kediri, surat kabar ini memuat bantahan seorang tokoh NU Kediri, HM Taharudin bahwa HMI sama sekali tidak terlibat.

Surat kabar Nasionalis yang juga terbit pada waktu itu adalah *Perdamaian* yang dipimpin oleh S. Anwar³⁷. Koran ini semula dikelola oleh para jurnalis keturunan Tionghoa. Ketika pemerintah mewajibkan semua koran berafiliasi, S. Anwar memilih berafiliasi dengan Muhammadiyah, namanya diganti menjadi *Mertju Suar* dengan motto Penegak Pantjasila Untuk Kesatuan Bangsa dan Keagungan Agama. Disamping mengelola *Mertju Suar*, S Anwar tahun 1964 juga mengambil alih harian *Pewartu Surabaya* dari tangan The Swan Tiek (Santoso Tedjo), anak kandung The Ping Oen pendiri koran itu. Santoso Tedjo melepaskan saham surat kabar itu karena bukan merasa orang politik yang mampu memimpin koran. Semula dia masih tetap

³⁶ SPS Jatim, *op.cit.*, hlm. 108.

³⁷ *Ibid.*



duduk dalam pimpinan surat kabar itu sebagai wakil pemimpin umum tetapi mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan S. Anwar³⁸.

Majalah *Sketsmasa*, sebagai golongan yang anti komunis sangat menampakkan sekali dukungannya terhadap politik Bung Karno dan sering kali beritanya menyudutkan PKI, karena itulah dimasa ini majalah berita politik tengah bulanan ini beredar banyak di masyarakat terjual mencapai 125.000 eksemplar³⁹.

Ketika G.30.S/PKI meletus, surat kabar yang tidak ikut menyiarkan Komunike Dewan Revolusi yang dibacakan Letkol Untung adalah surat kabar *Harian Umum*⁴⁰. Akibat tidak dimuatnya Komunike Dewan Revolusi tersebut, keesokan harinya *Harian Umum* memperoleh sorotan tajam dari pihak PKI. Apalagi kantor *Harian Umum* berdekatan dengan kantor PKI di Jl. Panghela, untunghlah anggota-anggota GP Ansor yang tanggap terhadap situasi politik yang ada telah berjaga-jaga.

Begitu keterlibatan PKI semakin jelas dalam pemberontakan G.30.S beberapa wartawan diantaranya M. Binsyekh dan A. Azis Purwo menemui ketua PWI cabang Surabaya A.Azis meminta organisasi kewartawanan ini segera mengeluarkan pernyataan mengutuk pemberontakan itu. A. Azis

³⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

³⁹ Serikat Penerbit Surat Kabar Jatim, *op.cit.*, hlm. 109.

⁴⁰ *Ibid.*

segera mengadakan pertemuan pengurus. Hasil keputusan rapat pengurus PWI cabang Surabaya itu pada tanggal 18 Oktober 1965 memecat 36 wartawan yang dinilai menjadi pendukung G.30.S/PKI dari kenggotaan PWI, diantaranya 11 orang wartawan harian *Djalan Rakyat* antara lain: Soerjono Hadi, Soetrisno, KL. Karyadi, Manan S Adinda, Saleh Said, Supriadi Tomodiharjo, Goei Po Aan, M. Alhadar, Nio Ham Djoe, Widodopoetro, M. Masahal, dan lain-lain. 4 orang dari harian *Djawa Timur*, yaitu: Djoeki Abdul Azis, I. Soewarsito, Soegiman dan Titut Soeskandi (Ny. D. A. Azis), lainnya koresponden surat kabar Jakarta di Surabaya⁴¹.

Pemberontakan G.30.S/PKI membuat pemerintah segera mengambil tindakan terhadap surat-surat kabar pro-komunis. Pangdam VIII/Brawijaya memberikan izin khusus kepada surat-surat kabar yang tidak terlibat membantu komunis seperti *Sketsmasa*, *Surabaya Post*, *Jawa Pos*, *Suara Rakyat*, *Harian Umum* dan sebagainya. Sementara itu harian *Trompet Masyarakat*, *Djalan Rakyat* dan *Djawa Timur* serta *Mingguan Indonesia* yang jelas-jelas mendukung PKI dilarang terbit. Larangan ini berlaku mulai tanggal 8 Oktober 1965. Pangdam VIII/Brawijaya Mayjen TNI Basuki

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 111.

Rakhmat menetapkan larangan terbit itu berdasar instruksi Menteri Penerangan No. 12 tanggal 6 Oktober 1965⁴².

C. Sikap Politik Pers di Surabaya yang Mendukung dan Menentang PKI

Koran-koran yang pro PKI seperti *Djalan Rakyat*, *Djawa Timur*, *Trompet Masyarakat*, *Mingguan Indonesia*, *Mingguan Pemuda* semuanya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh PKI. Surat kabar-surat kabar tersebut banyak menyiarkan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat opini di masyarakat agar masyarakat mau mengikuti dan simpati terhadap kegiatan PKI dan juga menyiarkan sanggahan atau pendapat dari tokoh-tokoh PKI yang biasanya dikecam oleh tokoh-tokoh dari golongan lain. Berdasarkan tinjauan tersebut dapat dilihat bahwa sikap politik pers di Surabaya yang pro terhadap PKI sangat mendukung kegiatan PKI di segala bidang. Surat kabar ini juga disebut sebagai surat kabar berhaluan kiri⁴³.

Sedangkan pers yang kontra terhadap PKI seperti *Harian Umum*, *Suara Rakyat*, *Surabaya Post*, *manifesto/ Bhirawa*, *Sketsmasa* dan lain sebagainya tidak mendukung upaya PKI untuk menguasai pemerintahan

⁴² Trompet Masyarakat, *loc. cit.*

⁴³ Wawancara dengan Pkdiono pada tanggal 30 September 2002 di gedung PWI cabang Jawa Timur jalan Taman Apsari Surabaya.

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita yang diturunkan oleh surat kabar tersebut yang isinya menentang kegiatan PKI. Surat kabar ini juga disebut sebagai surat kabar berhaluan kanan atau nasionalis.

Disamping pers yang mendukung PKI dan yang menentang PKI, ada juga pers yang bersikap netral seperti surat kabar *Liberty*. Netral disini adalah tidak begitu mencampuri apa yang dilakukan oleh PKI dalam kegiatannya, melainkan hanya ingin bagaimana supaya koran tersebut laku di pasaran. Hal ini juga merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh surat kabar lain baik yang kontra maupun yang pro PKI. Meskipun begitu pers tersebut mau tidak mau harus ikut dalam percaturan politik yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu harus mendukung Pemerintah dalam menjalankan Manipol Usdek dan lebih condong pada yang kontra PKI.

Pada dasarnya pers yang mendukung dan menentang PKI memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pers yang mendukung PKI cirinya:

1. Sebagian besar beritanya mendukung upaya yang dilakukan oleh PKI beserta ormasnya untuk mencapai kekuasaan di Indonesia.
2. Berita tentang sisi baik PKI sering keluar.
3. Menulis berita yang menyudutkan pihak yang dipandang menghalangi PKI untuk mencapai kekuasaan.

Pers yang menentang PKI cirinya:

1. Beritanya menentang upaya yang dilakukan oleh PKI beserta ormasnya untuk mencapai kekuasaan di Indonesia.
2. Berita tentang sisi jelek PKI sering keluar.
3. Menulis berita yang isinya menyudutkan PKI beserta ormasnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan contoh mengenai surat kabar yang terbit di Surabaya baik yang mendukung PKI yang diwakili oleh *Trompet Masyarakat* maupun yang menentang PKI yang diwakili oleh *Sketsmasa*:

1. Pers di Surabaya yang Mendukung PKI

Trompet Masyarakat

Pada tahun 1947 harian *Trompet Masyarakat* merupakan surat kabar yang berjiwa Nasionalis yang bertujuan tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia, namun di tahun-tahun mendekati klimaks ofensif PKI 1965, *Trompet Masyarakat* sudah berubah menjadi koran dengan gigih membela dan mendukung aktifitas-aktifitas PKI beserta organisasi-organisasi yang berada di dalam naungannya⁴⁴. Hal itu terjadi karena surat kabar tersebut sudah disusupi oleh orang-orang PKI, sehingga dengan berjalannya waktu dan

⁴⁴ SPS Cabang Jatim, *Sejarah Pers di Jawa Timur Zaman Demokrasi Terpimpin* (Bahan tersebut merupakan kumpulan dari kliping jurnalistik yang dikumpulkan oleh Oei Hiem Hwie semasa ia masih aktif dalam jurnalistik)

pergantian pengurus dalam surat kabar tersebut dapat dipahami bahwa *Trompet Masyarakat* berpindah haluan menjadi surat kabar yang mendukung PKI, yang terwujud dalam pemberitaan yang dimuat di surat kabar tersebut. Diantara pengurus *Trompet Masyarakat* yang aktif dalam masa itu yaitu: Saleh Said (Ketua/Penanggung Jawab), Soeprijadi Tomiharjo BA (Wakil Penanggungjawab I), D. Widodo Putro (Wakil Penanggungjawab II), Goi Po Aan, M. Alhadar, M. Masahal, Nio Ham Djoe, Manan Adindab, Na Hong Siong, Djoko Sugito, Goi Hok Gie (Pemimpin Umum) dan F. Wowor (Pemimpin Perusahaan)⁴⁵.

Harian *Trompet Masyarakat* terbit untuk pertama-kalinya tanggal 26 September 1947 di Surabaya. Pada masa itu kota Surabaya merupakan daerah pendudukan Belanda, sedang kota-kota lain di Jawa Timur yang juga diduduki pasukan Belanda, yaitu Malang dan dan kota-kota perkebunan di sebelah Timur, semuanya itu merupakan hasil penyerbuan tentara Belanda dalam agresinya tanggal 21 Juli 1947, yang dikenal dengan sebutan *Clash I*⁴⁶.

Dalam perkembangannya, *Trompet masyarakat* telah beberapa kali mengalami perubahan perwajahan (*make-up, layout*⁴⁷), rubrik, tarip

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Oei Hiem Hwie pada tanggal 7 Oktober 2002 di jalan Medayu Selatan No. 6 (IV) Medokan Ayu Rungkut, Surabaya. *Clash I* adalah sebutan untuk Agresi Militer belanda yang pertama.

⁴⁷ *Make up*: menata wajah koran.

Layout sering disebut *dummy*: rancangan atau bentuk coba-coba atau tiruan dari sebuah halaman majalah, surat kabar atau buku sebelum dicetak. Karena itu ada

langganan maupun iklan dan bahkan juga haluan daripada surat kabar tersebut.

Sampai dengan tahun 1955, motto *Trompet Masyarakat* yang berbunyi: “*Pembawa suara Kaum Kecil, Bebas dari Segala Pengaruh*” memang masih dapat dirasakan, etikadnya untuk bebas dari segala pengaruh dari imperialisme dan kolonialisme masih terpelihara. Hal ini terbukti dengan hadirnya rubrik baru dalam harian tersebut, dengan nama “*Tanah Air*” lembaran kesusasteraan, yang diasuh oleh Djamil Soeherman, Mohammad Darjono dan Gerson Poyk yang isinya membela kepentingan bangsa Indonesia⁴⁸.

Sejak tahun 1959, berkaitan dengan dimulainya jaman Demokrasi Terpimpin, semua penerbitan pers, baik majalah maupun surat kabar, diharuskan memuat “*Ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno*”, baik yang berupa pidato kenegaraan maupun tulisan yang lain. Sehubungan dengan itu *Trompet Masyarakat* setiap hari menulis tentang Bung Karno di halaman depannya. Misalnya pada terbitan *Trompet*

yang menyebut contoh kasar dari media cetak yang akan dicetak. Dibuat diatas halaman kertas yang berisi kolom-kolom. Dengan mengerjakan *layout*, bisa dipertimbangkan seberapa jauh keindahan komposisi tata-muka sebuah tulisan. Karena dari sana akan bisa dilihat seberapa jauh kepantasan sebuah foto atau ilustrasi, misalnya atau seberapa ruang yang layak untuk tulisan dari jenis huruf yang digunakan, baik untuk judul, subjudul, maupun teksnya. Disamping itu juga untuk memudahkan petugas bagian layout atau redaksi dalam merancang tata letak dan juga untuk mencegah kesalahan sebelum terlanjur dicetak dan diterbitkan.

⁴⁸ SPS Cabang Jatim, *Sejarah Pers di Jawa Timur Zaman Demokrasi Terpimpin, op.cit.*, hlm 309.

Bahan tersebut merupakan kumpulan dari kliping yang dikumpulkan oleh Oei Hiem Hwie semasa ia masih aktif dalam jurnalistik.

Masyarakat 16 Mei 1963, terdapat judul “*Musuh-musuh Revolusi Masih Bergerombolan*”, artikel ini merupakan pendapat yang berasal dari Bung Karno⁴⁹.

Kecenderungan *Trompet Masyarakat* untuk memihak ke kiri, semakin jelas. Bagi pembaca-pembaca yang berada di pihaknya, akan merasa terhibur karena memperoleh bacaan yang menyudutkan lawan politiknya. Tetapi sebaliknya akan membuat pembaca diluar pihaknya menjadi panas hatinya.

Sebagai contoh, berita tentang pembunuhan yang berjudul “*Jagal Husin dari Mojokerto*”. Pada tahun 1963 di daerah Mojokerto terbongkar suatu perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bernama Husin, korban pembunuhan dikuburkan di lantai gudang milik Husin. Kemudian ternyata bahwa pembunuhan dengan menguburkan korban demikian itu tidak hanya sekali itu saja dilakukan oleh Husin di rumahnya, tetapi sebelumnya tidak pernah diketahui oleh orang lain.

Dengan terbongkarnya pembunuhan yang dilakukan oleh Husin yang selanjutnya mengubur korban di rumahnya itu, maka *Trompet Masyarakat* setiap hari memberitakan peristiwa pembunuhan itu. Setiap hari satu pembunuhan yang dilakukan oleh Husin, diceritakan secara terinci dimana ia bertemu dengan korbannya, bagaimana ia membujuk korbannya agar mau diajak singgah ke rumahnya, sampai kepada cara-cara pembunuhan dan penguburannya yang rapi hingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain.

⁴⁹ *Trompet Masyarakat*, *op.cit.*, 16 Mei 1963, hlm.1.

Trompet Masyarakat menyuguhkan berita pembunuhan oleh Jagal Manusia yang bernama Husin setiap hari, sehingga menurut koran tersebut, jumlah orang yang sudah dijagal oleh pembunuh berdarah dingin itu lebih dari 50 orang. Berita sensasional itu diberitakan secara serial, demikian itu tidak lain karena Husin adalah anggota Masyumi, yang pada dasarnya sangat dibenci PKI⁵⁰.

Sampai pada akhir penerbitannya, pemberitaan *Trompet Masyarakat* tetap berpihak kepada PKI. Koran berhaluan kiri dan memihak PKI tersebut berhenti terbit tahun 1965 ketika larangan terhadap segala kegiatan Partai Politik PKI beserta ormas-ormasnya. Sebagai contoh pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1965, dalam rubrik “*Surabaya Sehari-hari*” di halaman 4, tertera berita yang menyatakan Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menuduh organisasi pekerja di kantor pos Surabaya sebagai antek BPS yang harus ditindak tegas dengan mengawasi segala kegiatannya dan mencabut segala fasilitas yang ada⁵¹.

Pada halaman 1,2,3 dan 4 (*Trompet Masyarakat*) 6 Oktober 1965 hanya terbit 4 halaman. Dalam rubrik Dalam Negeri, Luar Negeri, Surabaya, dan Djawa Timur, seakan-akan dipenuhi dengan berita-berita tentang kemenangan dan kebenaran pihaknya, dan menyudutkan kedudukan pihak yang tidak disukai atau dimusuhinya. Pada halaman 1 misalnya, kecuali tulisan tajuk yang berjudul *Menolong Penderitaan*

⁵⁰ *Ibid.*, 15 Juni 1963, hlm.2.

⁵¹ Lihat lampiran 1.

Rakyat, dimuat berita utama dengan judul besar sepanjang 6 kolom yang berbunyi :
Peristiwa "30 September" diselesaikan Presiden Soekarno setjara pribadi.

Selanjutnya di halaman 1 itu juga terpampang judul-judul berita seperti:
*Perintah harian Men Pangau: Sekitar Warga AURI jang Terlibat Dalam Peristiwa
 30 September; Pak Bas sudah kembali: Semoga Tuhan Melindungi Bung Karno; D.N
 Aidit pada CGMI: Tiap Marxis harus kreatif; Perintah Harian Komandan
 Tjkrabirawa; Gambar Bung Karno Djadi Rebutan Rakyat.* Di tengah halaman
 terdapat berita 3 kolom dengan judul: *Aksi S.O.B.S.I dibenarkan dan Retol Kabir.*

Pada tanggal 9 Oktober 1965 *Trompet Masyarakat* masih terbit. Pada penerbitan hari Sabtu tanggal 9 Oktober 1965 nada pemberitaannya tidak banyak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Artinya sikap memihaknya masih tampak jelas. Berita utama dengan judul besar sepanjang 6 kolom membentang di halaman 1. Judul tersebut adalah: *Instruksi Pengurus Daerah F.N. Djatim: Perkokoh Persatuan Nasakom.*

Tajukrencana hari itu, ditempatkan di sisi kiri atas diset dua kolom dengan judul *Ambeg Parama Arta*, sifatnya masih agitatif (menghasut). Dalam tajuk yang tidak begitu panjang itu antara lain ditulis:

“... Sekarang anak panah kita sedang dibidikan ke projek Nekomim Maslaysia dan pengganjangan terhadap antek-antek BPS serta dalangnya imperialis AS.

Dengan mengetahui persis soal-soal pokok revolusi ini, tujuan sesungguhnya seruan pemimpin-pemimpin kita itu tidak lain adalah mentjegah djangan sampai terkena provokasi djahat pihak Nikolim, sehingga kita melupakan apa jang harus kita “Ambeg Paramaartakan”jakni mengganjang Nikolim dan antek-antek BPS.

Untuk melaksanakan seruan ini tidak bisa kita melalaikan tugas mengawasi segala gerak-gerik orang-orang bekas anggota partai terlarang Masyumi-PSI dan Murba⁵².

Artikel serial mengenai "Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno" dimuat 2 kolom di bawah tajuk rencana. Sedang dibawahnya lagi, juga diset dua kolom, disuguhkan pernyataan Politbiro CCPKI, disusul dibawahnya lagi (juga diset 2 kolom) instruksi ketua CCPKI D.N. Aidit yang berjudul "*PKI mendukung amanat Presiden Soekarno*". Politbiro Komite Central Partai Komunis Indonesia menyatakan mendukung sepenuhnya amanat tersebut, dan menyerukan kepada semua komite PKI dan seluruh anggota serta simpatisan partai komunis Indonesia dan semua ormas revolusioner yang dipimpin oleh kader-kader PKI untuk membantu pelaksanaan Amanat Presiden Soekarno, Panglima Tertinggi ABRI dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tersebut. Mengenai gerakan 30 September, CC PKI berpendapat bahwa persoalan itu adalah persoalan intern Angkatan Darat dan PKI tidak mencampurinya⁵³.

Pada uraian tersebut nampak sekali bahwa PKI ingin menghindari dari peristiwa G/30S 1965 agar tidak terkena pemberantasan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap gerombolan yang melaksanakan G 30S tersebut dan juga supaya

⁵² Trompet Masyarakat, 9 Oktober 1965, hlm. 1.

⁵³ Lihat lampiran 2.

tidak dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Pemerintah karena membantu gerombolan tersebut.

Sementara itu instruksi ketua CCPKI D.N. Aidit yang dimuat langsung di bawah pernyataan Politbiro tersebut, dengan judul *Kepada Kawan-kawan: Komite P.K.I. Djatim*. D.N. Aidit menyatakan Peristiwa 30 September adalah peristiwa intern Angkatan Darat, dan PKI tidak mencampurinya, dan menginstruksikan kepada semua anggota PKI untuk tetap melaksanakan tugas-tugas yang urgen memberantas si 5 jahat, 3 setan kota, 7 setan desa, "Malaysia", setan dunia Amerika Serikat dan revesionisme modern, serta mempertinggi kewaspadaan, menggalang terus persatuan revolusioner berporos dan berjiwa NASAKOM guna pelaksanaan Pantja Azimat Revolusi⁵⁴.

Gambar keenam pahlawan revolusi, jenderal-jederal yang dibunuh oleh pemberontakan gerakan 30 September 1965, dipaparkan berupa foto-foto kabur ditengah-tengah halaman 1. Keterangan gambar tersebut berbunyi:

"Para Djendral-djendral TNI jang telah dinjatakan gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata akibat adanya gerakan 30 September, terdiri dari almarhum Men. Pangad A. Yani, Brigjen Hajono MT, Mayjen S. Parman, Majdjen Soeprapto, Majdjen Soetojo dan Majdjen Pandjaitan"⁵⁵.

Pengumuman penting yang juga dimuat di halaman 1 Trompet Masyarakat 9 Oktober 1965 itu adalah pengumuman Pepelrada Djatim yang menetapkan

⁵⁴ Lihat lampiran 3.

⁵⁵ Trompet Masyarakat, 9 Oktober 1965.

pelarangan penerbitan surat kabar *Djalan Rakyat* dan *Djawa Timoer* karena menyiarkan berita-berita yang mendukung terhadap “Gerakan 30 September” yang dapat menyesatkan pendapat umum dan keselamatan jalannya revolusi⁵⁶.

Pernyataan diatas terpaksa dimasukkan *Trompet Masyarakat* dalam pemberitaannya karena pernyataan tersebut datang dari pemerintah yang wajib disiarkan oleh seluruh surat kabar di Jawa Timur walaupun *Trompet masyarakat* sendiri merupakan surat kabar yang mendukung PKI seperti halnya surat kabar *Djalan Rakyat* dan harian *Djawa Timoer* dan *Trompet masyarakat* sendiri ingin tetap dapat terus terbit di masyarakat.

Instruksi Pengurus Daerah Front Nasionalis Djatim dengan judul *Perkokoh Persatuan Nasakom* yang dijadikan berita utama dalam *Trompet Masyarakat* 9 Oktober 1965, terdiri dari 6 pokok persoalan. Pokok persoalan yang keenam berbunyi:

“VI. Ikutilah seruan Pangdam VIII/Brawidjaja Majdjen. Basoeki Rachmat untuk bergabung berhubung dengan gugurnja sebagai Pahlawan Revolusi Men/Pangad Lt. Djen Achmad Yani beserta perwira-perwira tinggi lainnja dan seorang Perwira Pertama akibat perbuatan jang biadab dari apa jang disebut Gerakan 30 September.”

Surabaja, 5 Oktober 1965
Pengurus Daerah
Front Nasionalis Djatim
Wk. Ketua
Ttd
(SD. Prajitno)⁵⁷

⁵⁶ Selengkapnya lihat lampiran 4.

⁵⁷ *Trompet Masyarakat* 9 Oktober 1965.

Berita penting lainnya yang termuat dalam *Trompet Masyarakat* terbitan Sabtu 9 Oktober 1965 adalah seruan Pantja Tunggal Tk II Surabaya yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya agar taat kepada segala sesuatu yang telah maupun yang akan digariskan oleh PJM Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin besar Revolusi Bung Karno, supaya masyarakat ikut menjaga ketenangan dan ketentraman dan menjauhkan diri dari tindakan sendiri-sendiri yang menimbulkan perpecahan, tetap awas dan waspada, menggalang persatuan nasional progresif revolusioner berjiwa NASAKOM terhadap aksi-aksi subversif pihak Nekolim⁵⁸.

2. Pers di Surabaya yang Menentang PKI

Sketsmasa

Salah satu penerbitan pers yang menentang sikap PKI pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) adalah majalah *Sketsmasa*, majalah tengah bulanan Pimpinan Soeripto Poetrodjaja⁵⁹ ini berhasil mencapai oplah⁶⁰ 125. 000 eksemplar tiap kali terbit, dan beredar di seluruh Indonesia.

Sketsmasa dengan motto “Melaksanakan Sosialisme Indonesia Dengan Pancasila” diklaim oleh Soeripto yang selain sebagai pemimpin umum/ redaksi, juga pendirinya bersama Soegi sebagai majalah politik pertama di Indonesia, yang terbit

⁵⁸ Lihat lampiran 5.

⁵⁹ SPS Cabang Jatim, *Sejarah Pers di Jawa Timur Zaman Demokrasi Terpimpin*, *op.cit.*, hlm. 340

⁶⁰ Oplah adalah: jumlah dari penerbitan pers yang terjual atau dicetak.

sejak tahun 1955 sampai sekitar tahun 1967-an⁶¹. Majalah *Sketsmasa* yang cenderung lebih mendukung politik Bung Karno berkembang pesat di seluruh Indonesia.

Dalam sikap politiknya yang menentang PKI, *Sketsmasa* menurunkan berita-berita yang isinya menyudutkan PKI tentang kebencian umat Islam terhadap komunis yang dapat menyebabkan kehancuran bagi umat Islam, seperti dalam pemberitaan *Sketsmasa* 7/VII/1964 yang berjudul “*Islam dan Komunis*”, di dalamnya diungkapkan:

Bertahun-tahun sejak berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) ditahun 1920 (sebelumnya bernama *Indische Party*, th. 1913), lalu timbul suatu perasaan yang mengkhawatirkan pemeluk agama-terutama agama Islam yang mempunyai penganut terbesar di Indonesia, bahwa penganut-penganut faham komunisme ini kelak atau kapan saja merupakan bahaya terhadap kehancuran agama ini.

Pemeluk-pemeluk agama Islam dan Pemimpin-pemimpin serta toko-tokoh Islam pada waktu itu dengan gigih telah mengatakan pendapatnya, bahwa orang-orang komunis merupakan anal-anal (rajap) jang akan memakan dari dalam tubuh Islam”⁶².

Artikel penting lainnya yang termuat dalam *Sketmasa* terbitan No. 7/VII/1964 adalah artikel yang diberi judul “*Komunistophobia dan Komunistomania*”

⁶¹ SPS Cabang Jatim, *Sejarah Pers di Jawa Timur Zaman Demokrasi Terpimpin*, *op.cit.*, hlm. 341.

⁶² Lihat lampiran 6.

dikemukakan di dalamnya bahwa orang-orang komunis yang terlalu cinta terhadap fahamnya dapat menyebabkan kehancuran bagi bangsa dan negara. Agaknya *Sketsmasa* menulis berita yang sifatnya menyudutkan PKI agar masyarakat mengerti tentang bahayanya komunisme itu⁶³.

Dibagian lain dari artikel majalah *Sketsmasa* yang berjudul *ANTI PANTJASILA*, nada pemberitaannya tidak banyak berbeda dengan sebelumnya. Artinya sikap memihaknya pada golongan nasionalis masih tampak jelas. Artikel tersebut berisi tentang siapa itu Pancasilais sejati dan siapa itu Pancasilais munafik, dan meragukan PKI sebagai Pancasilais sejati "Apakah PKI itu Pancasilais Sejati atau Munafik?"⁶⁴.

Artikel mengenai sanggahan berita yang beredar di masyarakat bahwa buruh di Indonesia dikuasai oleh PKI/Komunis. *Sketsmasa* menyanggahnya dengan menerangkan bahwa sesungguhnya sebagian besar buruh di Indonesia bukan dikuasai oleh komunis, para pengusaha tidak perlu takut dan kuatir akan hal itu karena hantu-hantu dari SOBSI ini tidak menguasai seluruh buruh di Indonesia. Artikel tersebut berjudul "*SEBAGIAN BESAR BURUH INDONESIA BUKAN DIKUASAI KOMUNIS*"⁶⁵.

⁶³ Lihat lampiran 7.

⁶⁴ Lihat lampiran 8.

⁶⁵ Lihat lampiran 9.

Dalam tulisan *Sketsmasa* yang lain yang berjudul *INDONESIA -- KOMUNIS..?* dikatakan bahwa anggapan dari negeri Barat tentang Indonesia sudah dikuasai oleh komunis, disangkal oleh *Sketsmasa*, memang komunis tumbuh di Indonesia tetapi Bangsa Indonesia bukan Bangsa Komunis, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berideologi Pancasila bukan Komunis. Komunis dapat hidup di Indonesia karena harus menerima Pancasila secara keseluruhan walaupun secara terpaksa dan ada maksud-maksud tertentu yang ada dibaliknya. Agaknya *Sketsmasa* menyindir PKI sebagai organisasi yang menerima Pancasila karena terpaksa dan ada maksud-maksud lain yang ada dibaliknya⁶⁶.

Sementara itu dalam artikel lain majalah *Sketsmasa* yaitu *Komunisme dan Sosialisme Indonesia* berisi tentang perbedaan antara komunisme dan sosialisme Indonesia dan memojokkan PKI bahwa komunisme dan sosialisme Indonesia tidak dapat hidup bersama karena bertentangan satu sama lain. Disini sifat *Sketsmasa* sebagai golongan pers yang menentang PKI semakin jelas⁶⁷.

Berita penting yang lain yang termuat dalam *Sketsmasa* terbitan No. 14/VII/1964 yang berjudul *Islam dan Komunisme di Indonesia* dipaparkan tentang sejarah bagaimana Islam dan Komunis di Indonesia tidak dapat bersatu, dimulai sejak berdirinya SI sampai perpecahan yang terjadi di dalam tubuh SI karena telah disusupi

⁶⁶ Selengkapnya lihat lampiran 10.

⁶⁷ Lihat lampiran 11.

oleh tokoh-tokoh komunis seperti Tan Malaka, Semaun, dan Darsono yang menggerogoti SI dari dalam sehingga dapat menyebabkan kehancuran SI⁶⁸.

Tulisan yang lain dalam *Sketsmasa* yang berjudul *Komunisme dan Agama*, nada pemberitaannya tidak berbeda dengan sebelumnya. Artinya sikap memihaknya kepada golongan yang anti komunis masih nampak jelas. *Sketsmasa* menuduh bahwa komunis adalah suatu faham yang tidak percaya adanya Tuhan, atheisme dan anti agama⁶⁹.

⁶⁸ Lihat lampiran 12.

⁶⁹ Lihat lampiran 13.

BAB IV

KESIMPULAN